Laporan Kegiatan Policy Talks-Diseminasi Policy Assessment 2025
"Menimbang Politik Anggaran Era Prabowo–Gibran"

Tempat	Zoom Meeting
Hari, Tanggal	Kamis, 24 Juli 2025
Narasumber	1. Felia Primaresti (Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute) 2. Roby Rushandie, M.Sc. (Research and Knowledge Manager, The PRAKARSA) 3. Fithra Faisal Hastiadi, Ph.D. (Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan)
Moderator	Christina Clarissa Intania (Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute)
Penyelenggara	The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

Ringkasan

Pada hari Kamis, 24 Juli 2025, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menyelenggarakan diskusi daring Policy Talks berjudul **"Menimbang Politik Anggaran Era Prabowo–Gibran"** sebagai bagian dari diseminasi hasil kajian kebijakan tengah tahun Policy Assessment 2025 pada bidang politik dengan judul kajian **"Efisiensi Anggaran Era Prabowo: Analisis Kekuasaan dan Kepentingan Elite"**. Adapun pemapar adalah Felia Primaresti (Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute) dengan narasumber/penanggap Roby Rushandie, M.Sc. (Research and Knowledge Manager, The PRAKARSA) dan Fithra Faisal Hastiadi, Ph.D. (Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan).

Pemapar pertama adalah Felia Primaresti (Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute). Dirinya menjelaskan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Instruksi utamanya adalah pembatasan belanja seremonial, studi banding, seminar, dll. Adapun tujuan positif dari efisiensi anggaran adalah mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran (Yuliafitri, 2024), dan meningkatkan efektivitas belanja negara. Sisi lain efisiensi anggaran adalah bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, anggaran bisa digunakan sebagai instrumen politik, bukan sekadar teknokratis (Schlogl, 2020). Adanya keterlibatan elite dan bisnis juga perlu diperhatikan di mana Rp300 triliun hasil efisiensi dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan TNI AD, dan investasi lewat Danantara di mana CEO Rosan merangkap Menteri & eks Ketua TKN Prabowo-Gibran. Potensi masalah adalah oligarki dan akses kekuasaan. Keterlibatan elite membuka potensi kebijakan

fiskal yang tidak berpihak pada rakyat. Selain itu, potensi penyalahgunaan efisiensi untuk konsolidasi kekuasaan dan jaringan politik-ekonomi.

Felia menjelaskan pembahasan kajiannya. Definisi efisiensi masih kabur di mana tidak ada indikator, tujuan, atau batasan jelas dalam Inpres 1/2025. Pemerintah gagal menjelaskan dampak pemangkasan secara transparan, akibatnya, publik sulit mengawasi dan muncul ketidakpercayaan. Ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan transparansi dalam AUPB, karena membuat pelaksanaan tidak bisa diawasi publik secara rasional. Dalam perspektif teori kebijakan publik, kebijakan yang tidak *evidence-based* cenderung menciptakan ketidakpastian dan ketimpangan dalam implementasi. Kebijakan pemangkasan juga tidak merata di mana sektor pendidikan tinggi, kesehatan, dan dana ke daerah mengalami pemotongan besar; sebaliknya, anggaran bagi Kemenhan dan Polri justru besar. Program seperti KIP-K terganggu, akses pendidikan di daerah 3T terdampak, tunjangan dosen sempat tidak dibayarkan, lembaga peradilan terhambat memproses laporan. Felia mengatakan hal tersebut melanggar asas keadilan dan asas prioritas kepentingan umum karena menempatkan keamanan negara di atas hak dasar warga. Logika *public choice theory* menjelaskan ini sebagai upaya pemerintah melayani kepentingan kelompok elite ketimbang warga biasa.

Felia melanjutkan bahwa program jumbo seperti Koperasi Merah Putih (Rp200 triliun) dan MBG (Rp121 triliun) dapat alokasi besar, meski belum siap sistemnya, banyak keracunan, dan potensi korupsi. Program kesehatan masyarakat seperti penuntasan TBC hanya dapat Rp1,5 triliun. Ini menunjukkan prioritas didasarkan pada nilai politik elektoral, bukan urgensi publik. Ini mencerminkan politik simbolik di mana anggaran dijadikan alat pencitraan dan konsolidasi, bukan pelayanan publik berbasis kebutuhan. Secara prinsip AUPB, ini mengabaikan asas kemanfaatan umum dan profesionalitas.

Dalam struktur pemerintahan yang boros, pemerintah melakukan efisiensi anggaran tetapi mengangkat banyak staf khusus. Jumlah pos kabinet membengkak jadi 109 (Menteri, Wakil Menteri, pejabat setingkat Menteri). Efisiensi sebagai alat konsolidasi kekuasaan. Alokasi anggaran besar ke lembaga keamanan dan program populis menunjukkan strategi memperkuat dukungan politik. Rekrutmen TNI besar-besaran untuk fungsi sipil (pertanian, kesehatan) memperluas peran militer dalam ranah publik. Di sisi lain, pemangkasan ke sektor yang rentan dan partisipatif memperlemah kontrol sipil. Hal ini sesuai dengan *public choice theory* di mana efisiensi tidak ditujukan untuk penghematan, tapi untuk memperkuat aliansi kekuasaan dan meminimalkan gangguan dari kelompok non-loyal. Ini bertentangan dengan asas akuntabilitas dan pemerintahan yang terbuka.

Felia mengatakan kelompok kepentingan masih banyak di militer di mana teknokrat belum terlalu terlihat berperan. Militer memperoleh keuntungan melalui ekspansi ke sektor sipil, dominasi proyek

MBG, dan peningkatan anggaran pertahanan. Korporasi besar terlibat langsung dalam proyek perumahan rakyat, *food estate*, dan infrastruktur strategis. Elite politik memainkan peran sebagai pengarah kebijakan, sekaligus penerima insentif dalam bentuk jabatan strategis dan penguatan legitimasi. Sebaliknya, aktor seperti masyarakat sipil, teknokrat, dan UMKM terpinggirkan, baik dalam perumusan kebijakan maupun implementasinya. Ini mencerminkan pelanggaran terhadap asas partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas dalam AUPB.

Selain itu, dalam Public-Private Partnership (PPP): Kolaborasi atau Konsolidasi Oligarki?, Felia menyampaikan kebijakan perumahan 3 juta unit melibatkan pemain besar seperti Agung Sedayu Group dan investor dari Qatar serta UEA. Pendekatan PPP mempercepat pembangunan, tetapi menimbulkan kekhawatiran soal akuntabilitas dan privatisasi kebijakan sosial, serta dominasi elit dan swasta dalam kebijakan tanpa melibatkan elemen masyarakat lain. Lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penunjukan mitra menunjukkan bahwa kemitraan ini lebih bersifat transaksional daripada strategis. Himpera mengatakan penyalurannya masih banyak ditalangi oleh Bank. UMKM, koperasi sekolah, dan komunitas lokal tidak mendapatkan ruang dalam desain maupun pelaksanaan.

Dalam Dampak Kebijakan: Oligarki Fiskal dan Peminggiran Masyarakat, Felia menyampaikan praktik pelibatan eksklusif aktor kuat dalam proyek strategis menyebabkan pengabaian keselamatan publik (kasus keracunan MBG diredam sebagai deviasi statistik). Ketidakadilan fiskal (UMKM tersingkir, masyarakat adat kehilangan akses lahan). Privatisasi kebutuhan dasar (perumahan, pangan) di bawah kontrol segelintir aktor.

Felia menjelaskan pemerintahan Prabowo–Gibran menandai pergeseran dari pendekatan populis Jokowi (bansos, BLT) menuju pendekatan fiskal yang terpusat dan berorientasi keamanan serta simbol ketahanan negara. Narasi efisiensi digunakan untuk merasionalisasi redistribusi fiskal, padahal praktiknya menunjukkan konsentrasi anggaran pada institusi pro-penguasa seperti TNI, Polri, dan lembaga baru seperti BGN. Di samping itu, institusi dan program baru seperti BGN dan MBG yang di dalamnya juga dikelola TNI menunjukkan wajah patronase yang dimodernisasi. Ini menunjukkan bahwa proyek populis bukan lagi untuk pemberdayaan masyarakat, melainkan alat konsolidasi kekuasaan melalui relasi patron-klien yang lebih tersentralisasi dan terkontrol. Praktik ini melanggar asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta memperlihatkan konflik kepentingan yang kasatmata. Kemenhan dan Polri mendapat alokasi terbesar, sejalan dengan latar belakang militer Prabowo dan fungsi mereka sebagai pilar kekuasaan. Sementara, Kementerian lain seperti PUPR, Keuangan, dan Pendidikan mengalami pemangkasan signifikan, meskipun memiliki fungsi pelayanan publik utama. Ini menandakan bahwa patronase juga bekerja horizontal, memperkuat lembaga yang loyal dan melemahkan yang tak strategis secara politik.

Felia menyimpulkan beberapa hal. Pertama, kebijakan efisiensi anggaran dalam Inpres 1/2025 tidak memiliki definisi, indikator, maupun tujuan yang jelas. Hal ini membuka ruang penggunaan kebijakan secara lentur dan politis. Inkonsistensi pun tampak, seperti pengangkatan staf khusus di tengah pemotongan tunjangan dosen dan beasiswa, serta pembengkakan struktur kabinet yang justru kontraproduktif terhadap semangat efisiensi. Kedua, alih-alih diarahkan pada optimalisasi kelembagaan dan pelayanan publik seperti di Argentina atau AS, efisiensi anggaran di era Prabowo-Gibran tampak lebih menjadi alat konsolidasi kekuasaan. Dari kacamata teori Public Choice, keputusan anggaran lebih mencerminkan kepentingan aktor politik dominan, bukan kepentingan publik. Secara normatif, kebijakan ini juga melanggar asas keterbukaan, ketidakberpihakan, dan kemanfaatan dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Ketiga, tanpa arah yang jelas dan pengawasan ketat, kebijakan ini berisiko justru membebani sektor-sektor publik esensial seperti pendidikan. Minimnya komunikasi publik dan rendahnya analisis dampak sosial menunjukkan kurangnya sensitivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan.

Felia merekomendasi tiga hal. Pertama, transparansi anggaran berbasis data spasial. Kemenkeu dan Bappenas perlu menyediakan dashboard terbuka dan real-time yang menampilkan alokasi anggaran secara rinci untuk mencegah patronase dan memperkuat partisipasi publik, sesuai prinsip Open Data. Kedua, revisi formula dana transfer oleh DPR RI. Komisi XI DPR RI perlu menyesuaikan formula alokasi dana berdasarkan kebutuhan dan kapasitas fiskal riil, bukan pertimbangan politis, serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap distribusi anggaran. Ketiga, peran BPK dalam menjaga netralitas fiskal. Presiden perlu mengoptimalkan fungsi BPK untuk memastikan kebijakan anggaran tetap efisien dan berpihak pada kepentingan publik, bukan elite atau kelompok tertentu.

Fithra Faisal Hastiadi, Ph.D. (Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan) menjadi penanggap kajian. Dirinya mengapresiasi penelitian TII yang disampaikan oleh Felia. Inpres 1/2025 itu menjaga APBN untuk kebutuhan rakyat. Di Januari 2025, ketika Inpres 1/2025 disampaikan, Presiden bersama Menteri Keuangan mengecek anggaran-anggaran yang tidak pas. Inpres 1/2025 ini bukan *budget cut*, tapi *budget allocation* yang nantinya bermuara pada pertumbuhan ekonomi. Yang terjadi adalah pembenahan anggaran. Dana pendidikan itu tidak ada pemotongan anggaran. Dana LPDP itu merupakan dana abadi yang dikelola. Pada Q1 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,87% di mana ada kontraksi pengeluaran pemerintah dibandingkan tahun lalu. Hal ini dikarenakan tahun lalu ada agenda pemilu.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif dan paket stimulus agar pada Q2 2025 nanti bisa terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi. Ketahanan keamanan itu masih satu layer dengan Asta Cita nomor 2 yang terkait ekonomi kreatif, energi,

ekonomi hijau.

Roby Rushandie, M.Sc. (Research and Knowledge Manager, The PRAKARSA) adalah penanggap kedua. Dirinya menjelaskan tujuan dari kebijakan fiskal. Secara teori, kebijakan fiskal tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi makro, redistribusi pendapatan, yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Mengapa pemerintah peduli akan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat? Tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah adalah aktor perekonomian yang memiliki motif ekonomi, seperti mencari *revenue*. Ketika ekonomi tumbuh, masyarakat memiliki pekerjaan, ada pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Infrastruktur dibangun untuk memfasilitasi bisnis yang bermuara para pendapatan pajak. Kepentingan pemerintah lainnya adalah *stay on power*. Pemerintah juga ingin masyarakat sejahtera.

Bias politik dalam desain fiskal itu ada beberapa, yaitu siklus elektoral (kebijakan fiskal berdasarkan siklus Pemilu), *common-pool* (menguntungkan kelompok tertentu yang dibiayai masyarakat), ilusi fiskal (mengabaikan konsekuensi beban pajak di kemudian hari, publik hanya melihat manfaat jangka pendek), *present bias* (beriorientasi jangka panjang dianggap sebagai biaya), dan *low trust* (rendahnya kepercayaan publik untuk kebijakan bersifat jangka panjang). Masyarakat perlu didik terkait bagaimana keuangan itu didapat dan bagaimana keuangan itu digunakan.

Bagaimana politik memengaruhi desain fiskal? Dalam teori *political economy*, kebijakan fiskal mencakup alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Roby kemudian mengatakan beberapa model *political budget cycle*, ada opportunistic cycle di mana ada kebijakan ekspansi sebelum pemilu dan kontraktif pasca pemilu. Kemudian ada ideology cycle yang terkait dengan ideology Kiri maupun Kanan. Lalu ada *Ultrarational Voters*, *External Shocks*, dan *Incompetent Parties*. Desain fiskal yang berkeadilan ada beberapa yang harus dilakukan, yaitu manajemen keuangan publik yang akuntabel dan transparan; pelibatan *stakeholders/*masyarakat; penerapan kaidah fiskal; dan ada *Independent Fiscal Institutions* (IFIs). Terkait kerangka Public Financial Management (PFM), PFM mencakup seluruh siklus keuangan publik, seperti perencanaan kebijakan, alokasi anggaran, belanja, akuntasi, audit. Sistem PFM yang kuat menimbulkan layanan publik lebih efektif, pertumbuhan inklusif, dan pengurangan kemiskinan. PFM berkualitas tinggi memperkuat lembaga inklusif.

Penerapan kaidah fiskal ini untuk memagari dari bias politik atau kekuasaan. Ditentukan dalam UU, agar tidak terjadi kebijakan fiskal yang bias politik. Indonesia juga menerapakan fiscal rules, yaitu Debt Rules. Keuangan negara sudah dipatok narasi utang kurang dari 60%, dan defisit kurang dari 3%. Ini ada konsekuensi besar saat ini, kalau rasio utang lebih 3% PDB, konsekuensi bisa dimakzulkan. Kaidah fiskal ini rules dan enforcement-nya mahal jika dilanggar. Terkait dengan kisah sukses efisiensi anggaran, Vietnam dan Argentina dapat menjadi contoh. Roby berpendapat

bahwa keberhasilan efisiensi itu adalah menurunkan defisit fiskal dan menurunkan utang, akan lebih baik jika ada kenaikan *credit rating*.

Sesi Tanya Jawab dan Tanggapan

1. **Adinda Tenriangke Muchtar:** Untuk Pak Roby, terkait pola *budget design* pemerintah Indonesia saat ini? Apakah lebih *dominant* di *political interests*, meski terkesan *heavy* di *public expenditure* lewat program-program populis, terlepas dari transparansi dan akuntabilitasnya? bagaimana konsekuensinya terhadap ekonomi Indonesia secara makro dan *welfare* spending khususnya? Dengan posisi parlemen yang 'satu suara' dengan eksekutif, bagaimana kita sebagai bagian masyarakat sipil, menuntut perbaikan tata Kelola *public finance management* yang realistis dan berdampak dalam situasi lemahnya *checks and balances* saat ini? Terima kasih.

   Jawaban: Secara umum kebijakan fiskal, juga akan tergantung dari *ideology political party*. Tujuan kebijakan fiskal secara umum pasti akan ada kepentingan yang *match*. Satu sisi, bagaimana pemerintah mencari *win-win solution* dengan situasi politik dan karakter masyarakat Indonesia. Belum ada partisipasi masyarakat sipil yang kuat, maka dari itu CSO seperti TII dapat mengkaji terkait mengapa hal ini terjadi, karena CSO ini salah satu aktor penting untuk transparansi, misalnya, terkait dengan kebijakan fiskal.

2. **Faiz Bramantya:** Pertanyaan untuk Pak Roby, Berdasarkan studi bibliometrik Loso Judijanto yang menunjukkan bahwa masyarakat lebih menekankan efektivitas, apakah ini mengindikasikan bahwa model kebijakan menjadi kurang relevan? Dengan kata lain, selama kebijakan tersebut efektif, bentuk atau pendekatannya tidak terlalu dipermasalahkan? Untuk Mbak Felia, tadi Pak Fitra menjelaskan bahwa TNI mendukung sesuai dengan Astacita. Tapi, seberapa serius dampaknya jika TNI terlalu jauh mencampuri urusan sipil?

   Jawaban:

   a. Roby: Maknanya ada kecenderungan concern publik kebijakan fiskal dari pemerintah yang transparan dan akuntabel. Kebijakan fiskal ada potensi menjadi instrumen politik karena secara teori pemerintah ingin *power*, masyarakat ingin pertumbuhan ekonomi. Praktik akuntabilitas dan transparansi oleh karena itu menjadi penting.

   b. Felia: Dari aspek kultural, TNI memiliki budaya yang komando yang berdasarkan perintah. Jika terlalu jauh mencampuri urusan sipil, maka akan ‘merusak’ demokrasi, seperti menyuarakan pendapat, partisipasi bermakna, dalam beberapa bulan ini sudah terlihat *symptom*-nya. TNI dan sipil bisa berjalan berdampingan, beriringan. Sudah

banyak kasus di mana aparat hukum dan masyarakat sipil bekerja sama menyelesaikan suatu masalah.

3. **Putu Rusta Adijaya:** Selamat siang, Pak Roby. Terima kasih banyak atas pemaparan Bapak. Saya ingin bertanya: apakah *fiscal rules* yang kita gunakan sekarang, yaitu *debt rules*, sudah cukup? Atau perlu ditambah *fiscal rules* lain atau menggunakan tiga *fiscal rules* yang belum? Terkait dengan keberhasilan tujuan efisiensi yang Bapak sampaikan tadi, yaitu rasio utang terhadap PDB berkurang, defisit terhadap PDB berkurang, dan rating bertambah, menurut Bapak, kapan keberhasilan tersebut dapat terlihat? Apakah dalam satu siklus ekonomi tertentu, atau bagaimana? Terima kasih banyak, Bapak.

   Jawaban: Melihat Inpres 1/2025 secara spirit secara bagus, mengurangi belanja yang tidak perlu. Indikator efisiensi apa yang dipangkas kan itu yang itu yang kita pertanyakan. Indikator paling dekat arah pemerintah memangkas lembaga, memangkas ASN ditawarkan pensiun dini. Harus ada *political will* mungkin defisit turun. Defisit turun dicapai pemasukan juga, *political will* memajaki super kaya.

4. **Nayaka Utama**: Terima kasih atas paparannya Pak Fithra dan Mba Felia. Saya ingin mendengar pandangan Pak Fithra dan Mba Felia, secara politik dan fiskal, apakah peran lembaga independen fiskal yang dicontohkan pada materi Pak Fithra dapat kita adaptasikan pada lembaga DPR agar mereka memiliki power untuk menjamin kebijakan fiskal yang berkeadilan serta edukasi publik yang memadai? Apabila ya, bagaimana idealnya hal ini terlaksana? Apabila dikaitkan dengan SDGs, bagaimana proyeksi Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi (SDGs 8) di tahun 2030 mengingat kondisi APBN yang masih dinyatakan defisit serta kebijakan efisiensi yang masih bertengangan dengan gemuknya struktur pemerintah. Terima kasih banyak.

   Jawaban:

   a. Felia: yang perlu diperkuat adalah BPK dan KPK karena saya rasa itu lebih efektif. DPR ada yang kritis terhadap efisiensi anggara dan menanyakan penambahan budget di TNI/Polri. Partai itu institusi, jadi keputusan ada di Ketua Umum. Melihat karakter partai saat ini, pesimis dengan adanya pengawasan ketat dan kritik-kritik keras di DPR. Saya tidak menyerah karena kita sebagai CSO adalah mengisi kekosongan check and balances ini agar pemerintah dan DPR on track.

   b. Roby: Best practice beberapa negara semakin banyak engara fiscal inclusion, model banyak melekat ke parlemen, murni independen, mungkin melekat ke bank sentra. Dalam

konteks ini tidak ada yang paling tepat, tergantung konteks Indonesia. CSO bisa menjadi rujukan terkait peran independent fiscal analysis. Perlu upaya ekstra mencapai 8%. Pertumbuhan ekonomi cepat perlu mengkritisi darimana pembiayaannya. Jangan sampai ekonomi tumbuh cepat, utangnya meningkat. Ini perlu yang diberitahu ke masyarakat.

5. **Putu Rusta Adijaya:** Bapak, terkait *tax* juga, menurut Bapak, Pigouvian Tax ini sebagai *corrective tax* ini mengapa belum diimplementasi ya, Pak? Atau ditunda implementasinya, seperti pajak karbon? Karena *negative externality cost* akan mengurangi kesejahteraan masyarakat di mana *social marginal cost*-nya lebih besar dari *marginal benefits*-nya.

   Jawaban: Perkembangan *tax-tax* meredam eksternalitas biasanya belum terlalau terlaksana, pajak karbon, cukai berpemanis. Mungkin pemerintah ada faktor teknis, faktor *special interest group*, sehingga sulit bagi pemerintah untuk menyinggung grup seperti itu. Ada faktor tersebut. Ada juga bias politik mungkin bisa menjadi pengaruh Pigouvian Tax belum diimplementasi.